

## Pernikahan Sementara dalam Hukum Iran: Dasar Hukum, Implikasi Gender, dan Perspektif Jurisprudensial

Abnan Pancasilawati<sup>1</sup>, Sulthon Fathoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UINSI Samarinda, Indonesia, <sup>2</sup>Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Email: [abnanpancasilawati@gmail.com](mailto:abnanpancasilawati@gmail.com)

### KATA KUNCI:

Pernikahan sementara,  
hukum Iran,  
jurisprudensi Syiah  
Imamiyyah,  
studi gender,  
feminisme Islam,  
mut'ah,  
hukum keluarga

### ABSTRAK:

Pernikahan sementara (mut'ah atau sigheh) memiliki tempat yang khas namun kontroversial dalam hukum keluarga Iran, yang berakar pada jurisprudensi Syiah Imamiyyah dan tercantum dalam Pasal 1075–1077 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran. Meskipun secara hukum dan teologis disahkan, mut'ah mengungkapkan keberlanjutan hierarki patriarkal dalam sistem status pribadi Iran. Berdasarkan penelitian etnografi Shahla Haeri dalam Law of Desire (1989) dan kritik hukum Ziba Mir-Hosseini dalam Marriage on Trial (1993), artikel ini mengkaji bagaimana institusi ini mengubah kedekatan menjadi kontrak berbasis gender yang memprivilegikan otoritas pria dan membatasi otonomi perempuan. Menggunakan konsep Simone de Beauvoir tentang perempuan sebagai “Yang Lain” dan kritik Fatima Mernissi terhadap politik seksual Islam, penelitian ini berargumen bahwa mut'ah berfungsi sebagai mekanisme yuridis yang mengkomodifikasi agensi perempuan dengan kedok legitimasi agama. Dari perspektif keadilan gender, mut'ah mengungkapkan ketidakseimbangan struktural dalam hak perceraian, pemeliharaan, dan warisan yang mencerminkan epistemologi patriarkal yang lebih dalam dalam jurisprudensi Islam. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terbatas pada pernikahan sementara, tetapi juga meresap ke dalam pernikahan permanen (nikāh dā'im) dan logika fiqh yang lebih luas, di mana pria mempertahankan hak sepihak untuk bercerai (talāq), poligini, dan perwalian (qiwāmah). Pola ini menekankan adanya hierarki gender yang tertanam dalam tradisi Sunni dan Syiah. Sebagai respons, ulama Syiah kontemporer membela mut'ah sebagai institusi yang disahkan Tuhan untuk mengatur hasrat manusia, mencegah hubungan yang tidak sah, dan menjaga keteraturan moral. Pemikir seperti al-Tūsī dan al-Ṣadr berpendapat bahwa ketidakseimbangan gender mencerminkan keadilan ilahi ('adl ilāhī) dan peran sosial yang terbedakan, bukan ketidakadilan, dengan demikian menempatkan institusi ini dalam kerangka besar jurisprudensi etis. Pembelaan ini menyoroti perbedaan epistemik yang dalam antara pembacaan reformis yang berorientasi pada kesetaraan gender dalam hukum Islam dan interpretasi tradisional yang berlandaskan teori perintah ilahi. Pada akhirnya, untuk memajukan keadilan gender dalam hukum Iran, tidak hanya perlu merevisi aspek prosedural mut'ah, tetapi juga meninjau kembali dasar teologis dan filosofis yang mendasari ketidaksetaraan gender dalam pemikiran hukum Islam.

## 1. Pendahuluan

Pernikahan sementara (mut'ah atau sigheh) dalam hukum Iran adalah salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dan kompleks dalam sistem hukum keluarga negara tersebut. Didasarkan pada jurisprudensi Syiah Imamiyyah dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran (Pasal 1075–1077), mut'ah diakui secara hukum sebagai bentuk kontrak pernikahan yang sah namun terbatas dalam waktu, berbeda dengan pernikahan permanen (nikāh dā'im). Meskipun secara hukum dan teologis disahkan, institusi ini tetap kontroversial dan mendapat kritik tajam, terutama dalam hal implikasi gender yang menyertainya. Mut'ah sering dipandang sebagai mekanisme yang memperkuat hierarki patriarkal, di mana otoritas pria diprioritaskan sementara otonomi perempuan dikekang (Haeri, 1989; Mir-Hosseini, 1993).

Meski telah banyak penelitian yang mengkaji aspek hukum dan sosial dari pernikahan sementara, masih ada gap yang signifikan dalam pemahaman terkait hubungan antara hukum, gender, dan legitimasi agama dalam konteks mut'ah di Iran. Penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada sisi kritis mut'ah sebagai praktik patriarkal yang merugikan perempuan (Mernissi, 1987), namun kurang mengulas secara mendalam tentang justifikasi teologis dan teoretis yang mendasari penerimaan institusi ini dalam hukum Syiah. Tidak banyak yang menggali lebih dalam bagaimana mut'ah, meskipun dipertahankan oleh sebagian ulama Syiah sebagai solusi moral dan praktis, memperlihatkan ketidakseimbangan gender yang mencolok dalam ranah hukum Islam dan budaya sosial di Iran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menyelidiki secara kritis kedudukan mut'ah dalam sistem hukum Iran serta dampaknya terhadap kesetaraan gender.

Pernikahan sementara berperan penting dalam dinamika hukum keluarga di Iran, terutama karena kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam perceraian, pemeliharaan, dan warisan. Memahami konsep mut'ah secara lebih mendalam tidak hanya relevan untuk analisis hukum Islam, tetapi juga penting dalam konteks perjuangan gender di masyarakat Iran. Penelitian ini menjadi mendesak mengingat posisi mut'ah yang berfungsi sebagai alat pengaturan hubungan seksual dan keinginan manusia yang sah dalam perspektif agama Islam, sementara juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan hierarki gender dalam masyarakat Iran. Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi yang besar untuk memahami keadilan gender dalam hukum keluarga Syiah dan memajukan pembaharuan hukum yang lebih setara.

Penelitian terkait pernikahan sementara telah dilakukan oleh berbagai ahli, termasuk Shahla Haeri melalui Law of Desire (1989) yang meneliti bagaimana mut'ah berfungsi dalam masyarakat Iran sebagai bentuk komodifikasi perempuan. Ziba Mir-Hosseini dalam Marriage on Trial (1993) juga mengkritik mut'ah sebagai institusi yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan dalam perjanjian pernikahan. Mernissi lebih jauh mengaitkan mut'ah dengan politik seksual Islam yang mengatur dan mengendalikan tubuh perempuan. Namun, penelitian-penelitian ini cenderung berfokus pada aspek sosial dan politik, sementara kurang meneliti justifikasi teologis dan filosofis yang mendasari keberlanjutan mut'ah dalam hukum Iran.



Penelitian ini membawa perspektif baru dengan menggabungkan analisis teologis, hukum, dan gender dalam studi tentang mut'ah. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana mut'ah dipertahankan dalam kerangka hukum Syiah dengan dasar teologis yang kuat namun mengandung ketidakseimbangan struktural dalam hak-hak gender. Penelitian ini juga mengkaji pembelaan mut'ah dari perspektif ulama Syiah kontemporer yang melihat institusi ini sebagai alat pengatur moralitas yang sah, meskipun terdapat ketimpangan yang jelas dalam hak-hak perempuan, khususnya dalam hal perceraian, pemeliharaan, dan warisan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis posisi mut'ah dalam hukum Iran, dengan fokus pada implikasi gender dan bagaimana hukum Syiah mempertahankan ketidakseimbangan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran mut'ah dalam pembentukan struktur patriarkal yang lebih luas dalam masyarakat Iran, serta memberikan wawasan tentang potensi pembaharuan hukum yang lebih adil bagi perempuan dalam konteks pernikahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami dinamika antara hukum, gender, dan agama dalam sistem hukum Iran. Manfaat lainnya adalah memperkaya literatur tentang feminism Islam dan hukum keluarga, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk reformasi hukum yang dapat lebih menciptakan keadilan gender dalam sistem hukum Iran. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan penting bagi para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, dan aktivis yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender di negara-negara dengan sistem hukum berbasis Syiah.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif analitis untuk mengkaji posisi pernikahan sementara (mut'ah) dalam hukum Iran, dengan fokus pada implikasi gender dan keadilan hukum. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang aspek hukum, sosial, dan teologis dari mut'ah yang tidak dapat diungkapkan melalui pendekatan kuantitatif. Studi ini berusaha untuk memahami bagaimana mut'ah berfungsi dalam sistem hukum keluarga Iran, serta bagaimana gender dan otoritas laki-laki dikonstruksi dalam kerangka hukum Syiah Imamiyyah.

Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang melibatkan teks-teks hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran, serta karya-karya akademis dan etnografis yang relevan, seperti Law of Desire oleh Haeri (1989) dan Marriage on Trial oleh Mir-Hosseini (1993), yang mengkritik institusi mut'ah dari perspektif gender. Analisis literatur ini juga mencakup pemahaman terhadap teks-teks agama yang mendasari hukum Syiah, seperti tafsir Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan sementara, termasuk ayat 4:24 dari al-Qur'an yang sering dirujuk dalam justifikasi hukum mut'ah (Arberry, 1996).



Selanjutnya, untuk menggali lebih dalam perspektif gender dalam hukum keluarga Syiah, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana yang memfokuskan pada teks hukum dan diskursus yang berkembang di kalangan ulama Syiah kontemporer. Melalui pendekatan ini, penulis mengidentifikasi bagaimana mut'ah digambarkan sebagai solusi moral dan teologis untuk mengatur hubungan seksual, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan ketidakseimbangan gender yang mendalam (Mir-Hosseini, 2006).

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan teori feminis, khususnya teori Simone de Beauvoir tentang "The Other" (De Beauvoir, 2011) serta kritik Fatima Mernissi terhadap politik seksual dalam Islam (Mernissi, 1987), yang digunakan untuk memahami peran perempuan dalam konteks pernikahan sementara. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai apakah hukum mut'ah benar-benar menciptakan keadilan gender atau justru memperkuat patriarki yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana interpretasi Syiah terhadap mut'ah mencerminkan struktur patriarkal dalam masyarakat Iran dan dalam hukum Islam itu sendiri.

Penelitian ini juga membandingkan pandangan Syiah dan Sunni mengenai pernikahan sementara untuk memahami dinamika perbedaan interpretasi dalam fiqh Islam yang berhubungan dengan gender dan hukum keluarga (Madelung, 2000). Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam dan feminism Islam, serta memberikan perspektif baru mengenai bagaimana reformasi hukum Islam dapat lebih responsif terhadap keadilan gender.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan sementara (mut'ah) dalam hukum Iran, meskipun sah secara teologis dan legal, mengungkapkan ketidakseimbangan gender yang mendalam dalam sistem hukum keluarga Syiah. Dalam analisis ini, kami menemukan bahwa mut'ah berfungsi sebagai institusi yang memperkuat hierarki patriarkal, yang memberikan kontrol penuh kepada laki-laki dalam hubungan kontraktual, sementara perempuan tetap dalam posisi yang sangat terbatas. Melalui pendekatan kualitatif yang memanfaatkan teori feminis dan analisis wacana, ditemukan bahwa meskipun mut'ah dipandang sebagai solusi moral dan praktis untuk mengatur hubungan seksual di Iran, ia beroperasi dalam struktur yang secara inheren merugikan perempuan.

#### Struktur Hukum dan Keterbatasan Perempuan dalam Mut'ah

Dalam hukum Iran, mut'ah didefinisikan sebagai kontrak pernikahan yang dilakukan untuk waktu tertentu dengan mahar yang sudah ditentukan (Fatah et al., 2025). Kontrak ini, meskipun sah, memiliki perbedaan mendasar dengan pernikahan permanen (*nikāh da'im*) dalam hal kewajiban dan hak-hak kedua pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mut'ah tidak memberikan hak



pemeliharaan (nafaqah) kepada perempuan selama masa pernikahan, kecuali jika secara eksplisit disebutkan dalam kontrak (Wilueng, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa pernikahan sementara lebih bersifat transaksional daripada institusi sosial yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara hubungan emosional atau mendukung kebutuhan sosial perempuan (Haeri, 1989).

Asimetri gender ini semakin diperburuk dengan hak sepihak pria untuk mengakhiri kontrak melalui hiba al-muddah (pemberian sisa masa kontrak), yang memberikan kontrol penuh kepada pria untuk menentukan durasi pernikahan tanpa ada kesetaraan hak bagi perempuan (Mir-Hosseini, 1993). Kondisi ini mencerminkan sistem patriarkal yang tertanam dalam fiqh Syiah, yang menempatkan pria sebagai agen hukum yang aktif dan perempuan sebagai peserta yang bergantung (Mir-Hosseini, 2006). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mut'ah dianggap sah secara agama, ia tetap beroperasi dalam logika patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terbatas.

### **Implikasi Sosial dan Stigmatisasi Terhadap Perempuan**

Secara sosial, mut'ah juga menimbulkan ketegangan antara pengakuan hukum dan penerimaan sosial. Di Iran, meskipun mut'ah diakui secara legal, perempuan yang terlibat dalam pernikahan sementara sering menghadapi stigma sosial yang besar. Sementara pria dapat menjalani mut'ah tanpa konsekuensi sosial yang berarti, perempuan sering kali mendapat penilaian negatif atau bahkan merusak reputasi mereka (Haeri, 1989). Fenomena ini mengungkapkan ketidakseimbangan dalam penerimaan sosial terhadap kedua jenis kelamin, meskipun secara hukum keduanya terlibat dalam kontrak yang sah. Hasil ini mengkonfirmasi pemikiran Simone de Beauvoir tentang konstruksi perempuan sebagai "Yang Lain," yang hanya didefinisikan oleh otoritas dan keinginan laki-laki.

### **Pandangan Ulama Syiah Kontemporer dan Justifikasi Teologis**

Sebagai respon terhadap kritik-kritik yang ada, ulama Syiah kontemporer membela mut'ah sebagai institusi yang disahkan oleh Tuhan untuk mengatur hasrat manusia dan mencegah hubungan yang tidak sah (Tūsī, 1970). Para ulama ini berpendapat bahwa ketidakseimbangan gender dalam mut'ah tidak mencerminkan ketidakadilan, tetapi lebih kepada pembagian peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kodratnya (al-Ṣadr, 1987). Namun, meskipun pembelaan ini berlandaskan pada pandangan agama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran ini sering kali memperkuat hierarki gender yang ada, dengan laki-laki tetap memegang otoritas dalam hal perceraian, poligami, dan hak perwalian (Mir-Hosseini, 1993).



## **Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam**

Dari perspektif fiqh, mut'ah dipandang sebagai bentuk pernikahan yang sah menurut Qur'an (Qur'an 4:24), namun hal ini masih memunculkan perbedaan signifikan dalam hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, Ziba Mir-Hosseini (1993) dan Fatima Mernissi (1985) mengkritik pemahaman fiqh yang mendukung asimetri hak dalam pernikahan, yang berakar dari interpretasi patriarkal terhadap teks-teks agama. Bahkan, meskipun para ulama Syiah mempertahankan mut'ah sebagai institusi yang sah, realitas hukum menunjukkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan hak perceraian, pemeliharaan, dan warisan.

## **Rekomendasi untuk Reformasi Hukum**

Dari hasil temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi dalam struktur hukum mut'ah yang lebih memperhatikan keadilan gender. Mengingat ketimpangan yang ada, penting untuk merancang sistem hukum yang memberikan hak yang setara bagi perempuan dalam hal perceraian, pemeliharaan, dan warisan, tanpa bergantung pada struktur patriarkal yang ada. Pembaruan ini juga harus mencakup reinterpretasi terhadap teks-teks agama dengan pendekatan yang lebih egaliter dan berfokus pada keadilan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip feminism Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan (Saptorini, 2024).

## **4. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengkaji pernikahan sementara (mut'ah) dalam hukum Iran, dengan fokus pada implikasi gender dan struktur patriarkal yang ada dalam hukum keluarga Syiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mut'ah diakui secara hukum dan teologis, institusi ini tetap memperlihatkan ketidakseimbangan gender yang mendalam. Pria memiliki hak penuh dalam hal pengaturan durasi, penghentian kontrak, serta kewajiban pemeliharaan, sementara perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih terbatas, tanpa hak setara dalam hal perceraian atau pemeliharaan. Mut'ah, meskipun dianggap sebagai solusi moral dan agama untuk mengatur hubungan seksual, beroperasi dalam kerangka patriarkal yang memperkuat kontrol laki-laki atas perempuan, sementara perempuan tetap terpinggirkan dalam peran mereka dalam pernikahan. Temuan ini mengungkapkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam hukum keluarga yang tercermin dalam pernikahan sementara dan bahkan pernikahan permanen (nikāh dā'im), di mana pria tetap memegang hak-hak unilateral, seperti hak perceraian (ṭalāq) dan poligini. Selain itu, meskipun mut'ah telah dibela oleh ulama Syiah sebagai institusi yang sah secara agama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa justifikasi teologis tersebut tidak cukup untuk menutupi ketidaksetaraan yang terus terjadi dalam sistem hukum tersebut.



## **Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai ketidakseimbangan gender dalam sistem hukum Iran, namun masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana mut'ah diterima dan dipraktikkan di masyarakat Iran kontemporer, terutama dalam konteks perubahan sosial dan politik yang tengah berlangsung. Selain itu, riset lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak mut'ah terhadap hak-hak perempuan di luar aspek hukum, seperti dampaknya terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis perempuan yang terlibat dalam pernikahan sementara. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan perspektif dari perempuan yang menjalani mut'ah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka dalam sistem hukum yang patriarkal ini. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang potensi reformasi hukum dalam konteks keadilan gender dan bagaimana pendekatan-pendekatan teologis yang lebih inklusif dapat diintegrasikan dalam fiqh Syiah juga sangat relevan untuk dikembangkan, guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara bagi perempuan di Iran.

## **5. Referensi**

- al-Ṣadr, M. B. (1987). *Durūs fī ilm al-uṣūl*. Majmua al-shahid ayatullah al-sadr al-alami. <https://books.google.co.id/books?id=agBCAQAAQAAJ>
- Arberry, A. J. (1996). *The Koran interpreted: A translation*. Simon and Schuster.
- De Beauvoir, S. (2011). *The second sex* (C. Borde & S. Malovany-Chevallier, Trans.). *Vintage.(Original Work Published 1949)*.
- Fatah, N., Laili, S., Akbarizan, A., & Munir, A. A. (2025). Nikah Mut'ah di Iran dan Indonesia antara Regulasi dan Praktek. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 1–7.
- Haeri, S. (1989). *Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i Iran*. Syracuse University Press. <https://books.google.co.id/books?id=f1CzcNX-nVgC>
- Madelung, W. (2000). *Temporary marriage in Islamic law BT - Encyclopaedia of Islam* (2nd ed. (ed.); Vol. 10, p. 324). Brill.
- Mernissi, F. (1987). Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim. *Society. Revised Ed. Bloomington: Indiana UP*.
- Mir-Hosseini, Z. (1993). Marriage on trial: A comparative study of Islamic family law in Iran and Morocco. *London, IB Tauris (Second Edition with New Preface, 2000)*.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645.
- Saptorini, E. (2024). Kesetaraan dan Keadilan dalam Islam: Tinjauan Hasil Konferensi CEDAW tentang Feminisme berdasarkan Karakteristik Islam. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 4(3), 30–36.
- Ṭūsī, M. Ḥ. (1970). *al-Nihāyah fī mujarrad al-fiqh wa-al-fatāwá*. Dār al-Kitāb al-‘Arabī. <https://books.google.co.id/books?id=Y6Jo0QEACAAJ>
- Wilueng, W. (2024). Perkawinan Kontrak (Nikah Mut'ah) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *CAUSALITY: Journal National Public Issues*, 1(3), 77–83.

